

**ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MENENGAH
DI KABUPATEN GOWA*****MEDIUM EDUCATION FINANCING ANALYSIS
IN GOWA DISTRICT*****Novrian Satria Perdana****Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan****Email: novrian1711@gmail.com*****Abstract***

Education as a core activity of HR development has proven to have a significant contribution to economic benefits. In order to fund the cost of education, especially to quality secondary education, it is necessary to know in advance how much funding is needed and where the funding sources are obtained. Based on the description, the purpose of this study is to calculate the cost of non-personnel operating unit costs and its fulfillment strategies in the implementation of quality secondary education. The sample of this study amounted to 10 schools consisting of 4 high schools and 6 public and private vocational schools in Gowa Regency, South Sulawesi Province in 2018. Based on the results of the study, it was concluded that the non-personnel operational costs at the high school level were obtained by variations in non-personnel operational unit costs (BONP) ranging from Rp. 735,000. IDR 3,850,000 per student per year. And the sample BONP of Vocational High School shows quite a high variation, which is around Rp1,845,000. Rp.4,429,000 per student per year.

Keywords: Financing, High School, Vocational School

Abstrak

Pendidikan sebagai kegiatan inti pengembangan SDM terbukti telah memiliki sumbangan yang signifikan terhadap keuntungan ekonomi. Dalam rangka mendanai kebutuhan biaya pendidikan khususnya hingga pendidikan menengah bermutu, perlu diketahui terlebih dahulu berapa besar dana yang dibutuhkan dan darimana saja sumber pembiayaan yang diperoleh. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah menghitung kebutuhan biaya satuan operasi nonpersonalia dan strategi pemenuhannya dalam penyelenggaraan pendidikan menengah yang bermutu. Sampel penelitian ini berjumlah 10 sekolah yang terdiri atas 4 SMA dan 6 SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan biaya operasional non personalia tingkat SMA diperoleh variasi biaya satuan operasional nonpersonalia (BONP) berkisar antara Rp 735.000 s.d. Rp 3.850.000 per siswa per tahun. Dan BONP SMK sampel memperlihatkan variasi yang cukup tinggi pula yaitu berkisar antara Rp1.845.000 s.d. Rp4.429.000 per siswa per tahun.

Kata kunci: Pembiayaan, SMA, SMK

PENDAHULUAN

Tatanan ekonomi dunia sedang berubah ke masa perdagangan bebas dan investasi bebas, dimana perdagangan barang dan jasa antar negara tidak lagi mengalami hambatan-hambatan yang berarti dalam *quota* dan tarif. Bentuk perdagangan bebas

di era global saat ini dampaknya adalah Indonesia harus mempersiapkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetensi dan standarisasinya mengikuti kualifikasi dunia. Faktor utama yang menentukan keunggulan adalah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menghasilkan produk dan jasa yang layak diunggulkan. Artinya diperlukan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan profesional sebagai andalan utama yang menentukan keunggulan.

Pendidikan sebagai pranata utama penyiapan sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam menentukan kualitas SDM. Pendidikan juga mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan SDM lebih mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu pada umumnya negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dari sisi ekonomi, pendidikan bukan hanya semata-mata dipandang sebagai kegiatan konsumtif, namun diakui sebagai suatu investasi sumberdaya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui cara-cara meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kecakapan, sikap dan produktivitas. Bagi masyarakat secara umum pendidikan bermanfaat untuk teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Referensi [1] *The Human Capital Theory* menyatakan bahwa pendidikan menanamkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai kepada manusia dan karenanya mereka dapat meningkatkan kapasitas belajar dan produktivitasnya. Hal ini memungkinkan mereka mengejar tingkat pendidikan dan pelatihan yang lebih tinggi dan meningkatkan pendapatan masa depan mereka dengan meningkatkan penghasilan seumur hidupnya.

Banyaknya manfaat dalam pengembangan sektor pendidikan tersebut, sudah selayaknya apabila pendidikan menjadi perhatian utama suatu bangsa. Beberapa studi yang dilakukan Bank Dunia menunjukkan bahwa investasi pendidikan

sebagai kegiatan inti pengembangan SDM terbukti telah memiliki sumbangan yang signifikan terhadap keuntungan ekonomi. Hal ini menyatakan bahwa keuntungan ekonomi (*rate of return*) investasi pendidikan ternyata lebih tinggi daripada investasi fisik dengan perbandingan rata-rata 15,3% dan 9,1%. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan adalah investasi yang menguntungkan baik dari segi sosial maupun ekonomis.

Dalam kegiatan operasionalnya, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari faktor biaya. Biaya (*cost*) dalam pengertian ini memiliki cakupan luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga [2]. Selanjutnya, anggaran terdiri dari dua sisi, penerimaan dan pengeluaran. Sisi penerimaan berisi besarnya dana yang diterima dari setiap sumber dana, sedangkan sisi pengeluaran berisi alokasi besarnya biaya pendidikan yang harus dibiayai.

Disadari bahwa upaya meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan seiring tuntutan era global serta perkembangan IPTEK yang begitu cepat memerlukan pembiayaan yang makin besar. Mengingat pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM, sudah selayaknya bila pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap pembiayaan pendidikan. Pemerintah perlu melakukan kajian berapa banyak sumber daya pendidikan yang harus disiapkan dan berapa besar biaya yang dibutuhkan agar layanan pendidikan menengah dapat terselenggara dengan cukup dan bermutu. Ketercukupan layanan pendidikan ini disesuaikan dengan jumlah siswa pendidikan menengah yang harus dilayani. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut bagaimana pendidikan itu dibiayai. Tetapi menyangkut pula bagaimana dana yang tersedia tersebut dialokasikan [3]. Keterbatasan biaya pendidikan dikhawatirkan akan menurunkan mutu pendidikan dan meminimalisasi

efisiensi dan kesenjangan, baik menggali sumber biaya maupun mengalokasikan dana.

Biaya pendidikan adalah nilai uang dari seluruh sumber daya pendidikan tersebut dalam satu periode waktu. Pembiayaan dalam bidang pendidikan mempunyai kesamaan dengan bidang lain dalam konsepnya, dimana lembaga pendidikan dipandang sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh lulusan [4]. Dengan demikian kegiatan pendidikan dapat dipandang sebagai services terhadap siswa atau peserta didik selama proses pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu strategi yang diterapkan oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran bagi peserta didik serta membiasakannya dalam lingkungan pembelajaran agar terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia dan budi pekerti [5].

Pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber biaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan alokasi belanja untuk proses pengajaran, termasuk pengeluaran sekolah untuk gaji dan berbagai pelayanan di setiap jenis sekolah [6]. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah [7]. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barangan tenaga.

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah memberikan dana penyelenggaraan pendidikan adalah merupakan tanggung jawab sosial yang diemban oleh negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa

sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang. Perwujudan tanggung jawab Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dinyatakan dalam pengalokasian dana pendidikan oleh Pemerintah (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD) sebesar 20% termasuk gaji tenaga pendidik. Komitmen Negara tersebut dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 dan Pasal 49 ayat (1), Perubahan UUD 1945 ke IV Pasal 31 ayat (4), dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pengucapan putusan perkara No. 24/PUU-V/2007. Sedangkan tanggung jawab pembiayaan pendidikan oleh masyarakat diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat secara kelembagaan mendirikan satuan pendidikan, peserta didik, dan orang tua atau wali peserta didik yang membiayai penyelenggaraan di tingkat satuan pendidikan [8].

Konsep dana pendidikan telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam aturan tersebut dinyatakan secara garis besar terdapat tiga jenis biaya pendidikan, yaitu: biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Terkait biaya satuan pendidikan sendiri mencakup empat ragam yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Sedangkan biaya penyelenggaraan juga terdiri atas biaya investasi dan biaya operasi. Biaya operasi dalam kedua jenis biaya di atas terdiri dari biaya operasi personalia dan non-personalia [9]. Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pokok dari biaya pendidikan mencakup biaya investasi, operasi, dan pribadi. Mengenai sumber pendanaan pendidikan, Pasal 51 dari peraturan tersebut juga menyebutkan adanya tiga unsur, yaitu Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pengelolaan biaya pendidikan dalam implementasinya perlu diperhatikan kesesuaian antara perencanaan, dan

pelaksanaan yang keduanya memiliki peran yang strategis. Pengelolaan biaya pendidikan yang transparan dan akuntabel akan mendorong terjadinya pengelolaan biaya pendidikan yang efektif [10].

Dalam rangka mendanai kebutuhan biaya pendidikan menengah bermutu, perlu diketahui terlebih dahulu berapa besar dana yang dibutuhkan dan darimana saja sumber pembiayaan yang diperoleh. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah menghitung kebutuhan biaya satuan operasi nonpersonalia dan strategi pemenuhannya dalam penyelenggaraan pendidikan menengah yang bermutu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melaksanakan penghitungan biaya satuan operasional nonpersonalia per sekolah, per rombongan belajar, dan per siswa yang akan digunakan untuk menghitung kebutuhan biaya operasional nonpersonalia pendidikan menengah bermutu. Sementara pendekatan kualitatif ditandai dengan melakukan DKT dan wawancara dengan responden, dalam hal ini sekolah dan Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa. DKT untuk mengumpulkan informasi tentang strategi penggalan dana. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang data pengeluaran biaya operasi non personalia SMA dan SMK untuk melengkapi daftar isian.

Sampel adalah bagian dari elemen yang dimiliki oleh populasi. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu [11]. Sampel penelitian ini berjumlah 10 sekolah yang terdiri atas 4 SMA dan 6 SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Pemilihan sekolah sampel berdasarkan pada sekolah yang memiliki jumlah siswa banyak di

Kabupaten Gowa sehingga biaya operasional nonpersonalia yang dikeluarkan sekolah relatif lebih lengkap dan bervariasi dan diharapkan sekolah tersebut adalah sekolah yang memiliki layanan pendidikan yang cukup bermutu.

Variabel dalam penelitian ini adalah biaya operasional pendidikan non personalia di SMA dan SMK serta sumber-sumber pendanaannya, yaitu sumber dana dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, orangtua, dan masyarakat. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan terhadap data sekunder dan data primer dari Daftar Isian biaya satuan operasional pendidikan non personalia dari sekolah. Data hasil diskusi kelompok terpumpun dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan pendidikan menengah dan strategi penggalan dana melalui berbagai sumber tersebut.

HASIL PENELITIAN

Peningkatan pendidikan penduduk harus dipandang sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan. Mengingat pentingnya tujuan ini, pemerintah terus mengawal jalannya pendidikan agar dapat mencapai target yang diharapkan. Selama periode 2011 hingga 2017, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 RLS penduduk usia 25 tahun ke atas di Sulawesi Selatan menikmati pendidikan sampai kelas 2 atau 3 SMP. Dilihat dari HLS, masyarakat Sulawesi Selatan masih memiliki harapan untuk bisa mengenyam pendidikan hingga sekitar 13 tahun atau hingga bangku kuliah setaraf diploma. Persentase penduduk yang masih sekolah baik formal maupun non formal, tercatat sebagai Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS cukup tinggi untuk umur 7-12 tahun, di tahun 2017 sebesar 99,16 persen, yang artinya dari 100 anak usia 7-12 tahun, sekitar 99 orang mengikuti

pendidikan SD dan sederajat. APS menurun seiring bertambahnya umur. Terkait hal ini pemerintah masih terus mencanangkan pendidikan gratis hingga tingkat SLTA bahkan beasiswa untuk mahasiswa baru.

Berdasarkan uraian tersebut, perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan memperlihatkan hasil yang cukup membaik. Seiring dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun, angka melek huruf justru cenderung meningkat. Secara gender, persentase penduduk laki-laki 15 tahun keatas yang melek huruf (bisa membaca dan menulis) di Sulsel tahun 2017, lebih besar dibanding perempuan. Persentase laki-laki dapat membaca sebesar 92,31 persen sementara perempuan 88,72 persen. Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar penduduk khususnya anak bisa terus sekolah, capaian partisipasi sekolah di Sulsel pun meningkat dari tahun ke tahun. Fasilitas pendidikan merupakan salah satu faktor untuk memajukan pendidikan. Sesuai jumlah partisipasi sekolah 7-12 tahun, jumlah sekolah setingkat SD juga paling dominan, diikuti jumlah SMP/MTs, dan SMA sederajat. Rasio murid dan guru bervariasi pada setiap jenjang, paling tinggi pada jenjang SMA yaitu 15:1. Semakin tinggi nilai rasio, semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru. Data UNESCO 2014 menetapkan perbandingan 26:1 terhadap rasio murid dan guru. Rendahnya rasio murid dan guru dapat terjadi karena membludaknya perekrutan guru di Sulsel. Pemerintah perlu memperketat kualifikasi calon guru agar kebutuhan guru tidak hanya terpenuhi secara kuantitas.

Sejalan dengan capaian Provinsi, menurut data pokok pendidikan pada tahun 2018 Kabupaten Gowa telah memiliki 596 sekolah yang terdiri dari 413 SD, 111 SMP, 48 SMA, 19 SMK, dan 6 SLB. Diantara sejumlah sekolah tersebut, memiliki rasio siswa rombel sebesar 25 untuk jenjang SD, 31.05 untuk jenjang SMP, 30.76 untuk jenjang SMA, 28.49 untuk jenjang SMK,

dan 3.41 untuk jenjang PLB. Selain capaian rasio siswa rombel tersebut, untuk capaian rasio guru rombel adalah sebagai berikut: sebesar 1.53 untuk jenjang SD, sebesar 1.86 untuk jenjang SMP, sebesar 1.46 untuk jenjang SMA, sebesar 1.12 untuk jenjang SMK dan sebesar 0.87 untuk jenjang PLB. Capaian pendidikan di Kabupaten Gowa tersebut mengindikasikan akses pendidikan di Kabupaten Gowa telah cukup baik. Jika akses pendidikan baik maka akan tercapainya kualitas SDM yang baik pula.

Membahas mengenai akses pendidikan di kabupaten Gowa, berdasarkan hasil pengumpulan data pada 10 sekolah sampel, jumlah siswa yang tertampung di sekolah bervariasi antara 243 siswa hingga 1918 siswa. Capaian siswa tertinggi ada pada SMK Negeri 4 Kabupaten Gowa. Capaian siswa tertinggi berikutnya adalah di SMK Negeri 1, SMA Negeri 1, SMK Negeri 2, dan SMK Negeri 3. Berdasarkan hasil FGD, banyaknya siswa yang tertampung di SMK ini merupakan salahsatu strategi dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk meningkatkan percepatan keterserapan lulusan. Dengan banyaknya siswa lulusan SMK maka akan semakin banyak SDM berkualitas yang bekerja. Capaian ini juga sejalan dengan program Pemerintah yang menyatakan bahwa untuk mendukung pembangunan ekonomi, Kementerian Pendidikan Nasional membuat kebijakan yang signifikan tentang proporsi jumlah siswa SMA dan SMK dari 57,85%:42,15% pada tahun 2007 dan menjadi 30%:70% pada tahun 2014. Kebijakan tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

Capaian sejumlah siswa tersebut ternyata belum diimbangi keberadaan guru dan tendik tetap. Di Kabupaten Gowa, rata-rata membutuhkan guru honorer sebanyak 9 hingga 45 guru dan sebanyak 1 hingga 9 tendik honorer. Capaian jumlah guru honorer terbanyak ada pada SMK Negeri 1 (45 tendik) dan jumlah tendik honorer terbanyak ada pada SMA PGRI Sungguminasa (9 tendik). Masih banyaknya

kebutuhan tenaga honorer ini harus segera diatasi agar tidak terjadi beban anggaran sekolah secara berkelanjutan yang akhirnya juga berdampak pada penurunan kualitas pembelajaran akibat pergeseran penggunaan dana untuk membayar tenaga honorer.

Tabel 1. Profil Sekolah Sampel Kabupaten Gowa

No	Nama Sekolah	Status Akreditasi	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Jumlah Guru		Jumlah Tendik	
					Tetap	Honorer	Tetap	Honorer
1	SMK Negeri 1	A	1503	47	45	45	6	4
2	SMK Negeri 2	A	1185	40	47	22	6	4
3	SMK Negeri 3	A	1002	31	41	19	3	8
4	SMK Negeri 4	A	1918	63	76	38	6	1
5	SMK Negeri Somba Opu	B	619	21	10	38	0	7
6	SMK Garuda Bontonompo	B	411	11	7	28	0	4
7	SMA Negeri 1	A	1417	48	53	29	5	4
8	SMA Negeri 3	A	1002	31	41	19	3	8
9	SMA PGRI Sungguminasa	B	243	7	11	9	11	9
10	SMA YAPIP Sungguminasa	A	351	36	10	21	0	2

Kebutuhan Biaya Operasional Nonpersonalia

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai bentuk tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan di dalam satuan pendidikan. Jika suatu kegiatan dilaksanakan dengan biaya yang relatif rendah tetapi menghasilkan produk (*output*) yang berkualitas tinggi, maka bisa dikatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sementara itu, yang dimaksud dengan biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (pemerintah, orang tua siswa, atau masyarakat) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian

alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*oportunity cost*) yang dikeluarkan oleh siswa selama belajar.

Dalam Permen Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya, mensyaratkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, sedangkan biaya operasional satuan pendidikan meliputi: 1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, 2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan 3) biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, biaya pendidikan di sekolah mencakup biaya pengelolaan pendidikan di pemerintahan, biaya penyelenggaraan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Biaya penyelenggaraan pendidikan terdiri atas biaya operasional non personalia, seperti; alat tulis sekolah, bahan dan alat habis pakai, daya dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan ringan, transportasi, konsumsi, asuransi, pembinaan siswa/ekstrakurikuler, pelaporan. Biaya operasional personalia meliputi gaji dan tunjangan pendidik, gaji dan tunjangan tendik. Biaya investasi sarana dan prasarana terdiri atas lahan, taman, lapangan olah raga, lapangan upacara dll, bangunan, jaringan, perabot, peralatan, media pendidikan. Biaya investasi sumber daya manusia mencakup pengembangan pendidik dan pengembangan tenaga

kependidikan, Biaya Pribadi Peserta Didik terdiri atas biaya pendaftaran, SPP, komite, praktek, OSIS, ujian, bahan belajar, pakaian sekolah, buku, alat tulis, kursus, lainnya, transportasi, uang saku.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan formal, besar biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah dan tingkat satuan pendidikan bervariasi tergantung besar kecilnya sekolah dan lokasi tempat sekolah tersebut berada. Selain itu, besar kecilnya biaya sekolah bervariasi berdasarkan tingkat kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah termasuk sekolah negeri dan sekolah swasta. Kebutuhan biaya pribadi siswa juga tergantung lokasi dan kualitas sekolah. Sekolah yang berkualitas baik tentu memerlukan biaya yang besar, sebaliknya sekolah yang berkualitas buruk walaupun jumlah siswanya banyak biayanya juga tidak sebesar biaya di sekolah yang berkualitas baik. Letak sekolahpun berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya termasuk biaya pribadi siswa. Biaya sekolah yang berada di pedesaan atau di daerah terpencil berbeda dengan biaya sekolah yang ada di perkotaan. Dengan demikian lokasi dan tingkat kualitas sekolah sangat mempengaruhi besar kecilnya biaya pendidikan khususnya biaya pribadi siswa.

Berdasarkan kondisi sekolah tersebut, maka alokasi pembiayaan pendidikan tidak bisa disamaratakan. Di samping itu, peran masyarakat dan dunia usaha juga sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya sekolah.

Biaya Operasional Non Personalia Tingkat SMA

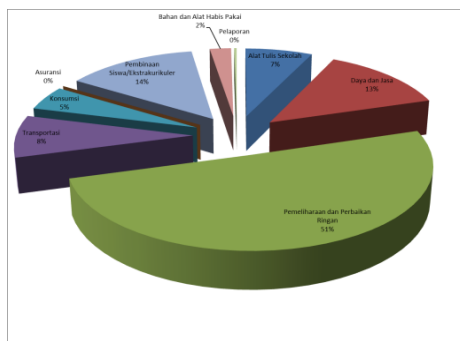
Berdasarkan data dari SMA sampel dengan diperoleh variasi biaya satuan operasional nonpersonalia (BONP) berkisar antara Rp 735.000 s.d. Rp 3.850.000 per siswa per tahun. Sebagian besar diantaranya memiliki BONP di atas dana BOS sebesar Rp1.400.000 per siswa per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah masih memerlukan sumber dana lain untuk menutup besarnya kebutuhan biaya

operasional nonpersonalia tersebut. Bagi SMA yang menerapkan sekolah gratis maka sekolah hanya mencukupkan pembiayaan biaya operasional nonpersonalianya dengan dana yang diterima. SMAN 1 Gowa, dan SMAN 3 Gowa hanya beroperasi dengan BONP kurang dari Rp1.400.000 per siswa per tahun, artinya lebih rendah dari dana BOS Pusat dengan jumlah siswa yang relatif lebih banyak, yaitu 1.420 siswa dengan BONP Rp1.191.000 untuk SMAN 1 Gowa dan 1.002 siswa dengan BONP Rp594.000 untuk SMAN 3 Gowa. Kedua sekolah SMAN ini tidak memasukkan biaya transportasi guru dan karyawan ke dalam BONP karena biaya transportasi guru dan karyawan merupakan biaya operasional personalia yang dibiayai oleh Pemerintah melalui gaji dan tunjangan PNS bagi guru dan karyawan yang berstatus PNS dan untuk guru dan karyawan honorer sebagian dibayar melalui dana BOS dan sebagian dari Pemerintah Daerah Provinsi. BONP di SMAN di Kabupaten Gowa ini belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan biaya operasional nonpersonalia di sekolah tersebut karena Kabupaten Gowa menerapkan "Sekolah Gratis" sehingga sekolah tidak dapat menarik dana dari orangtua dan sedapat mungkin hanya beroperasi dengan dana yang tersedia, yaitu dana BOS karena sejak pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, otomatis bantuan dana dari Kabupaten Gowa ke sekolah menengah ditiadakan, sementara Pemerintah Daerah Provinsi belum memiliki kebijakan untuk berkontribusi dalam membantu mendanai kebutuhan biaya operasional non personalia di sekolah menengah yang menjadi kewenangannya.

Kebijakan sekolah gratis sungguhpun terasa berat bagi pembiayaan operasional sekolah ternyata tidak mengurangi semangat sekolah untuk berprestasi. Penelitian serupa yang dilakukan menyimpulkan bahwa ada pengaruh program pendidikan gratis terhadap prestasi belajar siswa di kecamatan Tamalanrea kota Makassar. Artinya,

penerapan program pendidikan gratis di kecamatan Tamalanrea ikut menentukan prestasi belajar siswa [12].

Selanjutnya berkaitan dengan kondisi BONP di semua SMA sampel tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menggeneralisasi BONP di seluruh SMA karena kebutuhan BONP di tiap-tiap sekolah dipengaruhi oleh kebutuhan riil Biaya operasional non personalia di sekolah, status sekolah (negeri/swasta), dan kebijakan pemerintah daerah provinsi sebagai pengelola pendidikan menengah di daerahnya. Adapun penggunaan dana pendidikan di sekolah adalah sebagai berikut:



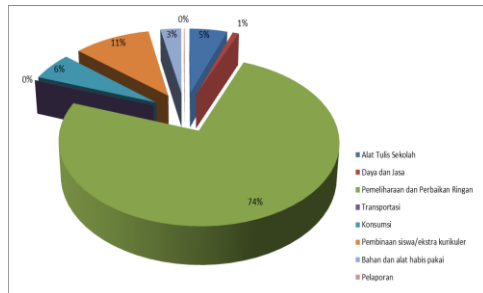
Gambar 1. Grafik Rata-rata Persentase Penggunaan Dana Pendidikan di SMA Kab.Gowa

Berdasarkan grafik di atas, rata-rata penggunaan anggaran biaya operasional non personalia di SMA yang terbesar digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan (51%). Penggunaan yang besar pada komponen ini meliputi pengecatan tembok, pagar, penyediaan alat kebersihan, dan sebagainya yang digunakan untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan fungsi media pembelajaran tetap baik. Komponen penggunaan dana yang terbesar adalah untuk pembinaan siswa/ekstrakurikuler (14%). Hal ini sangat diperlukan agar siswa diberikan ruang untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Besarnya komponen penggunaan dana untuk pembinaan siswa telah sesuai dengan juknis BOS Pusat dan telah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kualitas siswa.

Biaya Operasional Non Personalia Tingkat SMK

BONP SMK sampel memperlihatkan variasi yang cukup tinggi pula yaitu berkisar antara Rp1.845.000 s.d. Rp4.429.000 per siswa per tahun. Variasi yang cukup tinggi ini dapat dipahami mengingat tiap SMK memiliki beberapa kompetensi keahlian dimana BONP untuk masing-masing kompetensi keahlian tersebut sangat bervariasi sesuai dengan besarnya kebutuhan biaya untuk sub komponen bahan dan alat habis pakai untuk praktek siswa. Pada SMK dengan program keahlian yang memerlukan peralatan dan bahan praktek yang mahal, maka BONP untuk kompetensi keahlian tersebut akan tinggi. BONP di SMK sebagian besar sampel memiliki BONP di atas dana BOS (Rp1.400.000). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan biaya operasional non personalia di SMK jauh lebih besar daripada kebutuhan biaya operasional non personalia di SMA. Besaran BONP di SMK cenderung besar di sub komponen Alat dan bahan praktek untuk tiap kompetensi keahlian. Dengan demikian, dibutuhkan kontribusi dari sumber dana lain selain dana BOS. Padahal saat ini dana BOS diberikan sama baik untuk SMA maupun SMK. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah pada umumnya siswa yang sekolah di SMK: (1) cenderung berasal dari orangtua dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah; (2) biaya pendidikan di SMK lebih tinggi daripada di SMA; (3) adanya kebijakan agar proporsi SMK lebih besar daripada SMA. Ketiga hal tersebut mendorong Pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih bagi penyelenggaraan SMK baik dari sisi pembiayaan maupun kebijakan yang mendukung penyelenggaraan SMK.

Berdasarkan besaran dana yang dibutuhkan tersebut, penggunaannya antara lain sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Rata-rata Persentase Penggunaan Dana Pendidikan di SMK Kab.Gowa

Berdasarkan grafik di atas, rata-rata penggunaan anggaran biaya operasional non personalia di SMK yang terbesar digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan (74%). Adanya penggunaan terbesar komponen ini dikarenakan gedung dan banyaknya alat praktikum pembelajaran yang membutuhkan perawatan dan juga karena mengalami depresiasi setiap tahunnya sehingga memerlukan pemeliharaan dan perbaikan agar fungsinya dapat dimaksimalkan. Penggunaan dana terbesar berikutnya adalah untuk kebutuhan pembinaan siswa/ekstrakurikuler (11%). Hal ini sangat diperlukan agar siswa diberikan ruang untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik.

Strategi Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Bermutu

a. Sumber Pemerintah Pusat

Untuk di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh sekolah telah menerima dana BOS Pusat. Seluruh sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan hingga saat ini eblum menerima bantuan dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah, sehingga sumber dana untuk sekolah negeri hanya dari dana BOS Pusat, sedangkan untuk sekolah swasta diperbolehkan menerima dana partisipasi masyarakat. Adapun peruntukan dana BOS Pusat adalah untuk membiayai seluruh kegiatan di sekolah.

b. Sumber Pemerintah Provinsi

Hingga saat ini, semenjak peralihan pengelolaan ke Provinsi seluruh sekolah sampel menyatakan belum pernah

memperoleh dana bantuan rutin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Sumber Masyarakat

1) Orangtua. Seluruh sekolah negeri di Kabupaten Gowa bebas SPP. Hal ini dikarenakan dampak dari kebijakan sebelumnya saat masih dikelola Kabupaten, seluruh sekolah tidak boleh memungut biaya kepada siswa/orangtua.

2) Alumni. Berdasarkan hasil diskusi, bantuan alumni baru sebatas tali asih (beasiswa) untuk siswa tidak mampu di sekolah tertentu.

3) Perusahaan. Seluruh sekolah di Kabupaten Gowa menyatakan belum pernah menerima bantuan program CSR Perusahaan karena di wilayah tersebut tidak ada perusahaan berskala menengah atau besar. Adapun kerjasama dengan perusahaan skala kecil hanya sebatas penyediaan tempat prakerin khusus untuk siswa SMK.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan biaya operasional non personalia tingkat SMA diperoleh variasi biaya satuan operasional nonpersonalia (BONP) berkisar antara Rp 735.000 s.d. Rp 3.850.000 per siswa per tahun. Dan BONP SMK sampel memperlihatkan variasi yang cukup tinggi pula yaitu berkisar antara Rp1.845.000 s.d. Rp4.429.000 per siswa per tahun.

Besaran dana tersebut, rata-rata penggunaan anggaran biaya operasional non personalia di SMA yang terbesar digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan (51%). Sedangkan untuk SMK, rata-rata penggunaan anggaran biaya operasional non personalia di SMK yang terbesar digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan (74%).

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Houghton, Edward. 2017. *Human capital theory: assessing the evidence*

- for the value and importance of people to organisational success.*
- [2]. Nandani, Sri Citra Diah., dkk. 2018. Analisis Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan*, Volume 1 Nomor 1 Maret 2018.
- [3]. Rahmadoni, Jefril. 2018. Isu Global Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SD Indonesian Creative School Pekanbaru. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan* Volume 3, No. 2, Juli-Desember 2018.
- [4]. Rahman, Ansar. 2017. Efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Eklektika*, April 2017, Volume 5 Nomor 2.
- [5]. Irayasa, Kadek., dkk. 2018. Perbandingan Prestasi Belajar Siswa Sistem Full Day School Dengan Sistem Reguler Pada Mata Pelajaran IPA. *Jurnal Nalar Pendidikan* Volume 6, Nomor 2, Jul-Des 2018.
- [6]. Alfiningsih, Dwi Febryyani. 2018. Pengaruh Pembiayaan Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan Di SMK Satria Jakarta Barat. *Skripsi Manajemen Pendidikan* Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan.
- [7]. Ekasari, Yuliana Kurmiati. 2018. Pengaruh Biaya Pendidikan Dan Kinetja Guru Terhadap Pencapaian Siswa (Analisis Deskriptif Pada SMA Negeri Di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol.2 No. 1 April 2018.
- [8]. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
- [9]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- [10]. Rohiyatun, Baiq. 2018. Pengelolaan Biaya Pendidikan yang Efektif pada Pelaksanaan Program Kegiatan PAUD Rinjani Sebagai Lembaga Trifungsi Pendidikan (TPA, KB dan TK). *Jurnal Ilmiah Mandala Education* Vol.4. No.1.
- [11]. Sapri, Ahmad Farid. 2017. Pengaruh Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Makassar. *Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar*.
- [12]. Wahyuddin, dkk. 2014. Pengaruh Program Pendidikan Gratis Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Jurnal Nalar Pendidikan*, Volume 2, Nomor 1, Jan-Jul 2014.